

TEMA : Profesionalisme KPU dan Parpol dalam Proses Verifikasi Peserta Pemili 2014

Pengantar diskusi oleh:

1. **Indra J. Piliang** (Ketua Balitbang Partai Golkar)
2. **Endang Tirtana** (Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasdem)
3. **Hanta Yudha AR** (Research Associate The Indonesian Institute)
4. **Hadar N. Gumay** (Wakil Ketua KPU RI)

Moderator : Abdul Rohim Ghazali, Anggota Dewan Penasehat TII

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 32 orang. Peserta dari berbagai kalangan. Dari kalangan *civil society* antara lain dari CDI, Yappika, FORMAPPI, PPWI, Garsantara dll dan lain sebagainya. Dari media ada Jawa Pos, Gatra, Merdeka.com, Global TV, Kompas.com, Sindo Radio dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Indra J. Piliang (Ketua Balitbang Golkar). Hasil verifikasi parpol yang diumumkan KPU pada senin kemarin mengejutkan, dimana 34 parpol yang dilakukan verifikasi parpol oleh KPU, gagal. Artinya, partai barudan partai lama yang diverifikasi itu, tidak siap. Pertanyaannya kemudian, dimana letak ketidaksiapannya itu? Karena semua syarat yang ditentukan oleh UU sudah diberikan partai ke KPU. KPU dalam keputusannya memberikan syarat-syarat tambahan, dan dari aturan perundang-undangan itu mempunyai dasar hukum dan mejadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh bangsa ini.

Sistem informasi politik (SIPOL) partainya, ini dari KPU diberikan ke partai politik, kemudian dimasukan data oleh parpol ke dalam sistem itu, tapi data ini kemudian menimbulkan kekacauan. Misalnya ada perbedaan tahun lahir yang keluar dsb. Masalah lainnya, misalnya syarat satu kabupaten adalah 1000, namun dalam SIPOL ini juga mencantumkan data per kecamatan. Misalnya satu kecamatan 10, jadi 2, namun ada yang 12 kemudian jadi 20. Padahal syarat dari UU hanya 1000 per kabupaten. Positifnya KPU ingin ambil data real di lapangan, namun dari sisi parpol ini menimbulkan kekacauan.

Hal lainnya adalah, di sistem ini dicantumkan RT/RW, persoalannya di kampung-kampung pelosok itu tidak ada RT/RW nya, memakai term yang berbeda, misalnya dusun, kampung dan sebagainya. Dan itelm RT/RW ini harus diisi dan ketika dikosongkan itu akan bermasalah. Sistem ini bermasalah. Pada awal kita memberikan semua persyaratan ke KPU itu kita kira, kerja parpol selesai dan tinggal KPU yang memutuskan kita lolos apa tidak. Ternyata kita masih harus kerja lagi, seperti membantu kerja-kerja KPUD-KPUD di daerah.

Pertanyaan sekarang, persyaratan yang banyak dan rumit ini, akan menyulitkan KPU atau parpol ? Ada hal lain, misalnya soal kantor Partai, ada syarat jika sewa itu (sampai Oktober 2014) ada tanda kontraknya, dan jika milik sendiri sertifikatnya mana. Ini sebenarnya tidak terlalu perlu dipersoalkan karena kantor-kantorn partai di daerah itu juga biasanya tidak full kantor, tapi juga sekaligus tempat tinggal. Yang mestinya dipermasalahkan adalah, alamat-alamat kantor partai yang hanya di kartu nama namun tak ada fisiknya.

Endang Tirtana (Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasdem) keputusan MK ini, dari segi positifnya adalah yang terbaik, kita mau nunjukkan bahwa partai politik sebagai instrument penting untuk menjalankan bangsa ini, tertib administrasi.

Hal lainnya terkait persyaratan-persyaratan yang terdiri dari 17 dokumen persyaratan yang dari UU dan juga dari surat keputusan KPU. 17 persyaratan ini sudah Partai Nasdem siapkan dan dari tingkat daerah itu

sudah disampaikan ke KPU (walau pun sebenarnya itu bisa hanya di tingkat pusat yang hard copynya, dan di daerah soft copynya saja) dan kemudian diverifikasi.

Ketika sudah diserahkan dokumen ke KPU ada beberapa catatan kritis partai Nasdem yang juga banyak diperbincangkan oleh partai-partai lain dan lembaga lembaga lain, yaitu tentang SIPOL. Pertanyaan pertama adalah dasar hukum SIPOL, itu dalam peraturan KPU tak ada yang menyatakan secara jelas bahwa salah satu syaratnya adalah SIPOL. Hal lainnya, bahwa SIPOL ini sistemnya belum sempurna dan belum layak untuk dipakai sebagai salah satu persyaratan verifikasi.

Kelemahan sistem ini, baru disosialisasikan beberapa hari menjelang pembukaan pendaftaran partai politik, tidak jauh-jauh hari sudah disosialisasikan. Contoh ada beberapa data yang keluar dari SIPOL lebih dari data yang diserahkan ke KPU. Bisa saja salahnya adalah kesalahan dalam menginput. Namun akan bermasalah jika data itu berasal / bertukar dengan data dari kabupaten lain, sementara KPU meminta KPUD melihat keanggotaan di partai berdasarkan sipol ini. Kemudian masalah lain, ketika Selasa sistemnya tidak bisa dipakai, ada masalah beda input data dan keluaran dari Sipol ini, sementara batasnya adalah senin depan.

Pertanyaannya adalah Sipol untuk menjadi acuan parpol lolos verifikasi, atukah hanya untuk memudahkan sistemnya? Nasdem menyambut baik Sipol ini karena akan mempermudah partai sendiri, namun kalau ini tidak siap, akan bermasalah.

Hadar N. Gumay (Wakil Ketua KPU) Forum ini bisa kami gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkembang. KPU bekerja berdasarkan peraturan perundangan, Sipol itu diumumkan pada saat hari pendaftaran. Pada setiap parpol yang mau daftar dibagikan CD, itu untuk memasukkan data-data parpol, pengurus, keanggotaan yang kami ingin olah lebih mudah. Jika ada parpol yang belum selesai ada jangka waktu yang cukup lowong diberikan.

Maksudnya ada Sipol ini adalah agar ada data yang rapi, perempuan-laki dan seterusnya dari parpol-parpol ini dan dengan ini juga untuk memperlihatkan kesiapan partai-partai ini. Karena yang diinginkan KPU adalah agar penyelenggaraan Pemilu 2014 ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, ada yang "menawar" bisakah kalau itu hanya 50 persen saja yang lain tidak, itu tidak bisa.

Mengenai data dari Nasdem yang beda dari yang diinput dengan yang muncul di Sipol, itu akan KPU cek. Sebenarnya, CD itu parpol yang isikan, tapi ada yang kasih ke KPU itu bertumpuk-tumpuk dan tak ada jaminan yang paling akhir adalah yang paling bagus, dan ada juga yang tidak sesuai dengan format yang diberikan.

Hasil tanggal 8 kemarin, bukanlah untuk meloloskan atau tidak meloloskan Parpol dari proses verifikasi, itu hanya semacam lapor bayangan dan silahkan berekan yang belum beres. Terkait data partai di dalam Sipol ini lah yang menjadi dasar kerja kerja administrative KPU. Setelah ada Sipol, selanjutnya KPUD akan ngecek, apakah nama yang ada di Sipol itu ada KTA nya, dan jika ada maka akan di centrang sebagai tanda lolos verifikasi, dan inilah yang dikeluarkan pada minggu lalu. Dan data ini memang belum dikeluarkan, karena pertama data ini masih fluktuatif dan lagi apa partai politik mau data itu dibuka, karena based on KTA terlihat kekuatan politik dari partai-partai ini.

Sipol ini akan benar-benar digunakan sebagai dasar kerja administrative KPU. Setelah masa perbaikan ini, itu KPUD kan cek lagi namun yang sudah dicontreng lolos itu tak dibuka lagi, namun yang sebelumnya kosong atau jika ada yang perlu perubahan.

Hanta Yudha AR (Research Associate TII). Semangat awalnya sama, untuk memperbaiki pengorganisasian partai-partai politik. Dari parpol, dari aspek kelembagaan partai politik itu penting, ada problematic dalam sistem administrasi keorganisasian parpol kita. Ini juga adalah catatan lain mengukur profesionalisme KPU juga.

Instrument ini penting untuk mengukur kelembagaan partai, untuk dimensi sistem. Misalnya partai Golkar itu mestinya sudah sangat siap untuk ini dan lolos verifikasi. Sehingga shock dari partai Golkar itu hanyalah masalah administrative.

Untuk partai Nasdem harusnya juga siap, karena yang menginisiasi membawa ini ke MK. Proses verifikasi ini juga adalah untuk memastikan bahwa yang ikut pemilu adalah partai politik, karena yang akan digunakan adalah uang rakyat.

Catatan untuk KPU, di KPUD ada banyak catatan di berbagai daerah dan harus diantisipasi tidak ada proses kecurangan, politik transaksional yang lainnya. Karena jika di tingkat nasional itu banyak yang bisa mengawasi, tidak begitu di daerah ditambah lagi Bawaslu yang belum bekerja karena belum siapnya infrastrukturnya di sana.

Benni Inayatullah (Peneliti TII), Ada satu hal yang harus kita prediksi dari sekarang, partai partai lama itu kan sedang pucat sekarang untuk mengumpulkan KTA-KTA ini. PKB itu juga kelimpungan, dan juga partai besar seperti Golkar itu juga kelimpungan. Sehingga jika partai besar ini tidak lolos namun punya wakil di DPR yang banyak ini akan gaduh, itu apa antisipasinya?

SESI TANYA JAWAB

Syafrudin, Perkumpulan Perwarta setiap ada pemilu selalu banyak partai yang muncul dan sebagai Negara berkembang ini agak susah karena kapan kita mau seperti Amerika yang hanya ada dua partai? Atau kah ini memang strategi KPU agar partai-partai ini tidak lolos.

Tanggapan:

Indra J. Piliang memang harusnya begitu ya ada transparansi dalam soal pendataan ini. Namun ada hal juga di kelembagaan partai yang masih sangat kental sistem patronisasinya dan untuk ini diharapkan wisdomnya dari KPU. Data ini juga memperlihatkan semua kekuatan partai, oleh karena itu ini juga menimbulkan kegelisahan, dan tidak kemudian parpol tak mau membuka diri. Sehingga ketika diminta data, ada data-data yang dijaga tak diberikan untuk menjaga agar tidak terlihat kekuatan partainya itu sendiri.

Posisinya sekarang, KPU sangat kuat pegang regulasinya, dan jika Parpol ingin beres Sipolnya, maka Parpol bisa jadi lakukan emergency call untuk melengkapi isian Sipol ini. Artinya modernisasi yang dilakukan oleh KPU ini, harus diimbangi parpol-parpol sebagai yang “melamar” untuk jadi peserta pemilu.

Endang Tirtana, seiring kali masalahnya itu tidak di tingkat Parpol itu, tapi juga ada ketidaksiapan teknis KPU yang harus juga dipahami oleh teman-teman KPU yang bisa diperbaiki agar sistem ini lebih baik. Parpol beranggapan ini sistem yang baik, namun jika ada hal hal teknis yang berdampak pada kelolosan sebuah parpol itu bahaya. Sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan terus menerus, jangan sampai sistem yang belum baik ini dipakai terus menerus, dan apalagi hingga akhir di penghitungan cepat misalnya, akan menimbulkan konflik di daerah-daerah.

Kenapa ada partai baru setiap ada pemilu, saya rasa UU baru yang dilengkapi dengan syarat yang sangat banyak itu akan menjadi seleksi juga, sehingga parpol yang muncul tidak hanya ikut-ikutan, tapi memang siap.

Hadar N. Gumay. Persyaratan di UU Parpol yang baru itu banyak dan itu juga bisa menghambat munculnya partai-partai baru. Kemudian untuk penulisan tanggal lahir, itu memang harus strik dan jika memang tak bisa, kolom itu dianggap tidak ada. Untuk alamat itu memang kami inginkan agar tertib administrative, ini juga untuk parpol, sehingga ketika kami verifikasi itu dia memang ada.

Kami disumpah untuk bekerja sesuai peraturan perundangan, tak boleh tawar menawar, dan chaos nanti? Saya berdoa sekali ini tak hadir, dan kami himbau ke partai politik untuk kerja melengkapi ini, dan KPU siap membantu jika ada pertanyaan.

Hanta Yudha AR, catatannya bukan di beratnya sistem KPU tapi lebih ke administratif. Dan ini adalah momentum untuk memperbaiki partai, walau pun ada patronisasi di partai-partai. Walaupun ada personalisasi, ini juga momentum untuk memperbaiki ini semuanya. Ini bisa mengukur kesiapan sistem dari partai itu.

Untuk KPU, yang harus dilakukan adalah tetap professional, dalam menjalankan tugasnya, dan memang harus berdasarkan regulasi terkait dan tidak bisa ada tawar menawar.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH